

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Amirullah, Arief, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayu Media Publishing, Malang.

Ashafa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2013, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana (Buku I)*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Aust, Anthony, 2005, *Handbook of International Law*, Cambridge University Press.

Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary*, 4th, West. Publishing Co, USA.

Castella, Stefan D., 2007, *Asset Forfeiture Law in the United States*, Juris Net LLC, New York.

Djanggih, Muhammad Hatta Hardianto, dkk, 2019, *Tinjauan Hukum Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Seva Bumi Persada, Jakarta.

Grantland, Brenda 2009, *Asset Forfeiture: Rules and Procedures*, Forfeiture Endangers American Rights (FEAR), Washington DC.

Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia.

Harding, C., 2020, *Building an effective control of financial crime? The role of criminal law and transnational cooperation in the European Union*, Edward Elgar Publishing.

Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Cetakan I*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Hasbullah, Frieda Husni, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta.

Husein, Yunus, 2005, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tiga lima, Jakarta.

- Husein, Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Book Terrace & Library, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- Istanto, Sugeng, 1998, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Lamintang, PAF dan Theo Larnintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 83, dan selanjutnya dapat dilihat dalam Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Cetakan Kedua (Edisi Revisi)*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Lasmadi, Sahuri, dan Herman Suriyono, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.
- Lilley, P., 2003, *Dirty dealing: the untold truth about global money laundering, international crime and terrorism*, Kogan Page Publishers.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeloeng, Lexy J., 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Adhya Bakti, Bandung.
- Nurdjana, IGM, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- PPATK, 2017, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017*, PPATK, Jakarta.
- PPATK, 2021, *Standar Ketentuan Internal Tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya*, PPATK, Jakarta.
- PPATK, 2023, *Laporan tahunan PPATK 2023*, PPATK, Jakarta.
- PPATK, 2024, *Buletin PPATK Edisi Agustus 2024*, PPATK, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Putman, William H., 2004, *Legal Research, analysis and Writting*, Thomson Delmar Learning.

- Ramelan (Penys.), 2012, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Rihantoro Bayuaji, 2019, *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Surabaya, Laksbang Justisia.
- Rodliyah dan H. Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Radja Grafindo, Jakarta.
- Salim dan Erlies Septiana, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Shaw, Malcolm N., 2004, *International Law*, 5th Edition, Cambridge University Press. D.J. Harris, 1998, *Cases and Materiils On International Law*, Sweet & Maxwell, London.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Strauss, Anslem, 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sunggono, Bambang 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Bandung.
- Suranta, Ferry Aries, 2010, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Depok.
- Sutedi, Adrian, 2018, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Suyanto, 2023, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, Unigres Press, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2011, *Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Studi Komparasi Pengaturan dan Praktek Perampasan atas Aset/Kekayaan yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Unexplained Wealth) di Australia, Delegasi RI yang dipimpin oleh Kepala PPATK, Yunus Husein, Canberra.*

Yanuar, Muh. Afdal 2022, *Himpulan Anotasi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Edisi 2022*, PPATK, Jakarta.

Yanuar, Muh. Afdal, 2021, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press, Malang.

Yanuar, Purwaning M., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Jakarta.

Jurnal

Annisa, S. N., Dewi, N. L., Putri, D. H., dan Mustaqim. *Analisis Kasus Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Indra Kenz di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 12, 2022.

Aulia, Ardiansyah, Gilang Rizky Ramadhan, dll. "Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Bowles, Roger, Michael Faure, dan Nuno Garoupa, *Forfeiture of Illegal Gain: An Economic Perspective*, OJLS, Vol. 25, 2005.

Fauzia, Hamdani, *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 7, 2022.

Fuadi, Putri, dan Raharjo, *Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan*, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 5, No. 1, 2024.

Gordon, John E., *Prosecutors Who Seize Too Much and The Theories They Love: Money Laundering, Facilitation, and Forfeiture*, Duke LJ, Vol. 44, 1944.

Haswandi, *Pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya menurut sistem hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 1, 2017.

Hiariej, Eddy Omar Sharif, *United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 31 No. 1.

Ian Ko, *Tainted Assets, Dirty Money and the Civil-Criminal Dichotomy: A Novel Approach to the Classification of Civil Forfeiture Proceedings under the Criminal Proceeds (Recovery) Act 2009*. Auckland UL Rev., Vol. 21, 2015.

- Jaya, Arizon Mega, *Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Cepalo Vol. 1, No. 1, 2017.
- Lydia Anggun, *Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU Dan TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19*, Technology and Economics Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Nachrawi, Mohammad Al Faridzi Gunawan, *Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid. Sus/2021)*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Packer, Herbert L., *Two Models of the Criminal Process*, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 113, 1964.
- Patmos, Y. *Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi*. Journal of Law and Policy Transformation, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Sabrina Hidayat, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Halu Oleo Law Review, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Samuel Williams Roeroe, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan*, Lex Administratum, Vol. 10, No. 5, 2022.
- Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, 2017, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Sudarto, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Sudarto, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pasa Sarjana Hukum UNS, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Tantimin, *Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5, No.1, 2023.
- Wardhana, Rangganata Adhi Kusuma, dan Sularto, *Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2022.

Waterbury, John, 1976, *Political Stability and Development, Comparative Evidence from Egypt, Government and Opposition*, Morocco.

Yanuar, Muh. Afdal, *Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 4, 2019.

Zainal Arifin Hoesein, *Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.1, No. 3, 2012.

Skripsi, Tesis, Disertasi

Muib, 2017, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Persidangan*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Porajow, David Fredrick Albert, 2013, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum FH UI, Jakarta.

Ramadhan, Wahyu Aji, 2024, *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Korupsi*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sanrose, Diego Febriyano, 2021, *Pengaturan dan Implementasi Perampasan Aset di Pasar Modal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Waruwu, Eka Putra, 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang yang Predicate Crime Tidak Diketahui Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus: Perkara No. 537/K/PIDSUS/2014)*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Internet

ACAMS, Anti Money Laundering Glossary of Terms, Diakses dari <https://www.acams.org/en/resources/aml-glossary-of-terms#a-9799feca> pada 28 Oktober 2024.

Aditya, Nicholas Ryan, “Kerugian Negara Akibat Korupsi...” Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/15/11141271/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-selama-2023-capai-rp-56-triliun> pada 16 Oktober 2024.

APG, *APG Yearly Typologies Report 2017: Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing*, Diakses dari <http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=41f45467-8303-4b70-8791-038e5d4925f8> pada 8 Oktober 2024.

Budi, Mulia, Ahli di Sidang Harvey Jelaskan soal Kerugian Negara: Harus Nyata dan Pasti, <https://news.detik.com/berita/d-7627619/ahli-di-sidang-harvey-jelaskan-soal-kerugian-negara-harus-nyata-dan-pasti> pada 16 November 2024.

Gabriela, Michelle dan Riri Rahayu, “Eks Kepala PPATK Sebut Harvey Moeis Diduga Gunakan Modus *Mingling*” <https://www.tempo.co/arsip/eks-kepala-ppatk-sebut-harvey-moeis-diduga-gunakan-modus-Mingling-untuk-samarkan-hasil-korupsi-ini-maksudnya-1163377> pada 16 November 2024.

MoneyVal, *Typologies Report on Laundering the Proceeds of Organised Crime* pidato plenary meeting ke-47, tanggal 17 April 2015, Diakses dari https://www.apml.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/1463_typologies-report-on-laundering-the-proceeds-from-organised-crime.pdf pada 20 Oktober 2024 pada 28 Oktober 2024.

Rizki, Mochamad Januar, “Menelisik Penerapan Perampasan Aset dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelisik-penerapan-perampasan-aset-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt64d0ad7f05129/>, pada 31 Januari 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

United State Code 1988 & Supp. IV 1992 *Edition*.

Australia Confiscation Act 1997.

Queensland Criminal Proceeds Confiscation Act Number 68 of 2002.

New Zealand Criminal Proceeds (Recovery) Act 2009.

Nauru Anti Money Laundering and Targetted Financial Sanction Act Number 2 of 2023.

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.

Naskah Akademik RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, 2006.

Naskah Akademik RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, 2022.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XV/2017.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.,
atas nama terdakwa Emirsyah Satar.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN-JKT
PST, atas nama terdakwa Fuad Amin.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor
30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa Wa Ode Nurhayati.

Konvensi Internasional

United Nations Convention Againsts Illicit Traffic on Narcotics, Drugs, and
Psychotropic Substances, Vienna, 1988.

United Nations Convention Againsts Transnational-organized Crime, Palermo, 2000;
United Nations Conventions Againsts Corruption, 2003.

Financial Action Task Force on Money Laundering Recommendation Internasional
Standards on Combating Money Laundering and The Financing Of
Recommendation). Terrorism Proliferation, 2012.